

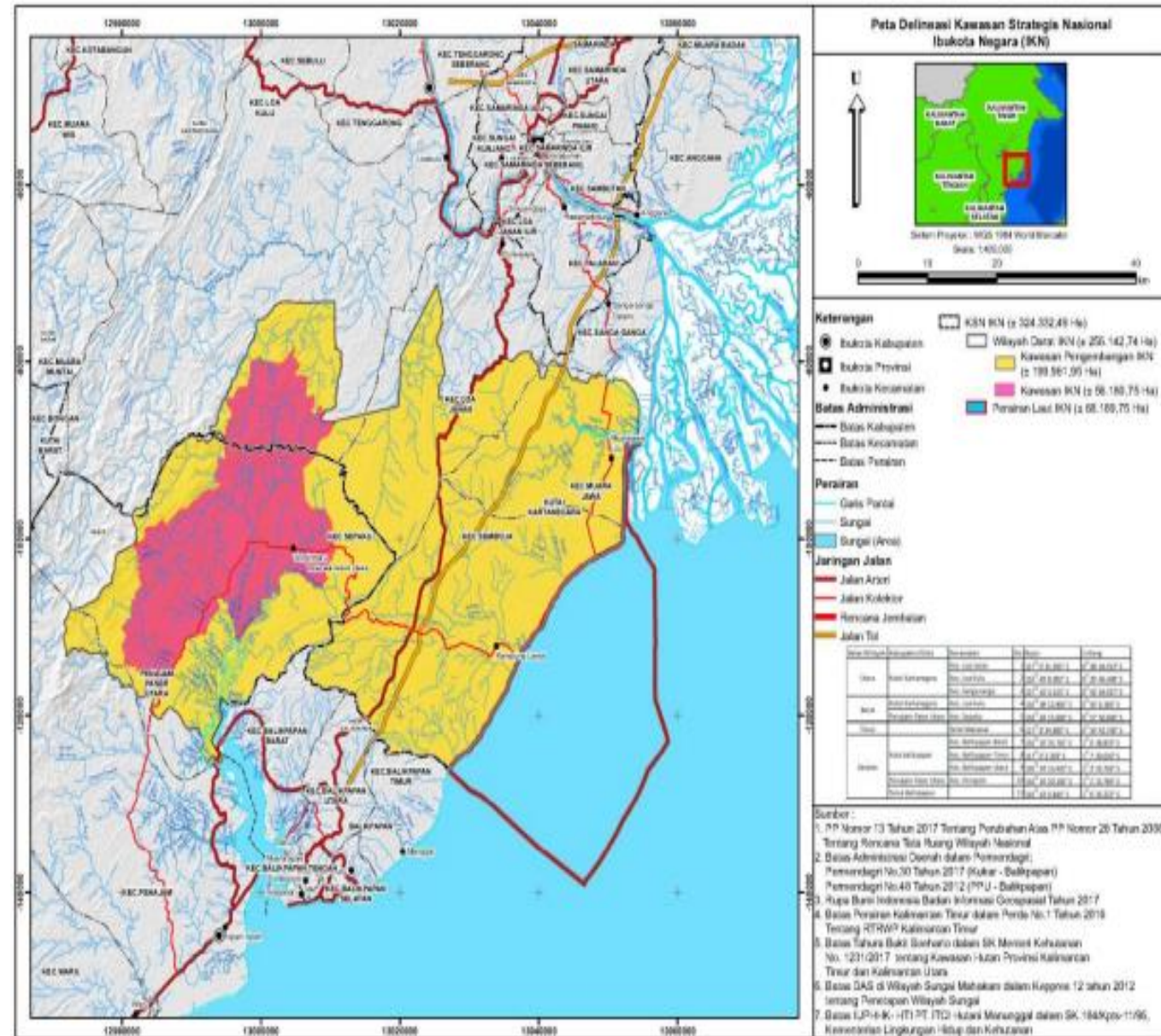
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT TERDAMPAK

Mahendra Putra Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Disampaikan pada Kuliah Umum "Ibu Kota Negara dan Aspek Hukum Pembangunan Ibu Kota Negara" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 17 Oktober 2022

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

IBU KOTA NEGARA

Pasal 21

Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal.

Pasal 37

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.

(2) Partisipasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi; dan/atau
- e. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUBJEK TERDAMPAK

ORANG/MASYARAKAT DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ORANG/MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ORANG/MASYARAKAT DI KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN TIMUR

APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENYELENGGARA NEGARA

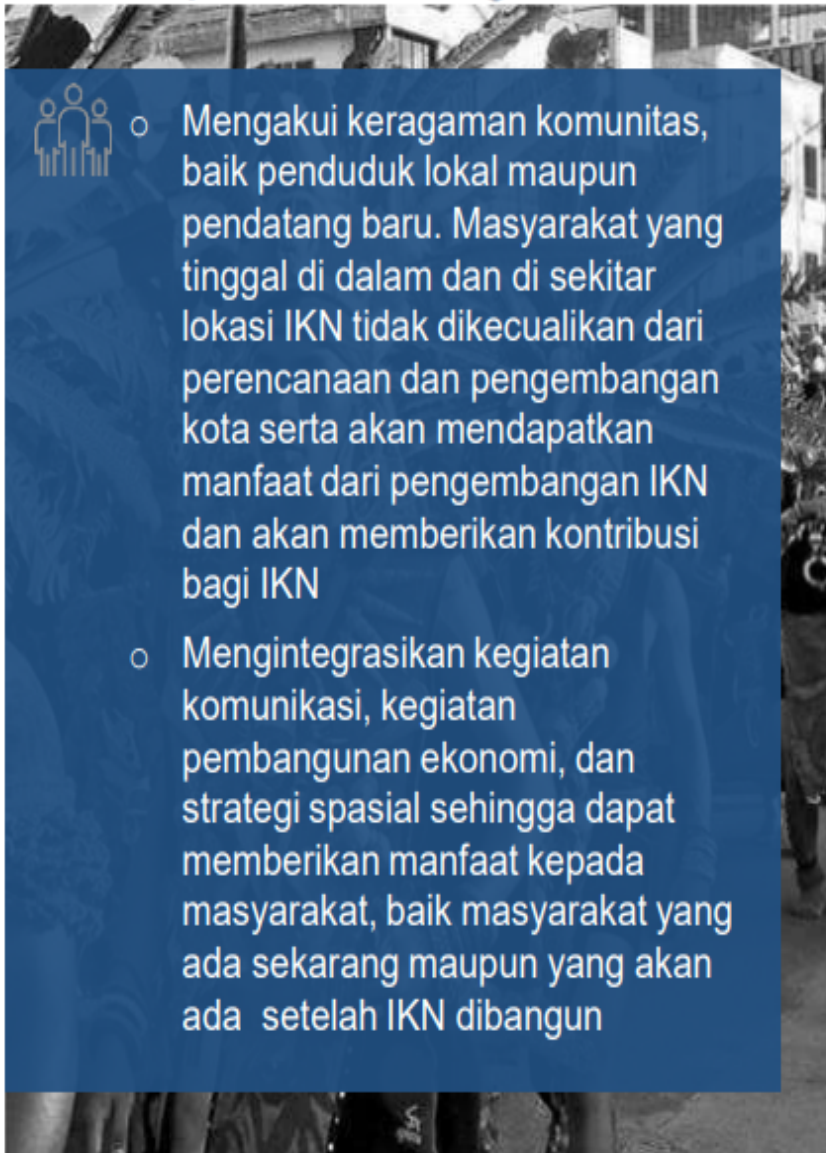
PERWAKILAN NEGARA ASING

INVESTOR/PEBISNIS

ORANG/MASYARAKAT INDONESIA

Bab III Prinsip Dasar Pembangunan IKN – C. Prinsip Dasar Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia (1/2)

C.1 Prinsip Dasar Pembangunan Sosial



- Mengakui keragaman komunitas, baik penduduk lokal maupun pendatang baru. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar lokasi IKN tidak dikecualikan dari perencanaan dan pengembangan kota serta akan mendapatkan manfaat dari pengembangan IKN dan akan memberikan kontribusi bagi IKN
- Mengintegrasikan kegiatan komunikasi, kegiatan pembangunan ekonomi, dan strategi spasial sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada sekarang maupun yang akan ada setelah IKN dibangun



1. Pengembangan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan yang difokuskan denganelibatan dan partisipasi aktif masyarakat lokal yang berkesinambungan



2. Pembangunan kompetensi untuk memastikan kesempatan kerja yang inklusif dan merata



3. Pemerataan akses ke fasilitas dan ruang publik untuk menghubungkan seluruh komunitas yang ada untuk membentuk identitas IKN



4. Pengadaan lahan berdasarkan aturan dan kebijakan atau standar yang bertujuan untuk memfasilitasi perlindungan sosial



5. Revitalisasi dan penataan kawasan permukiman masyarakat lokal mempertimbangkan keterkaitan dengan mata pencaharian dan keterikatan warisan sejarah dan budaya

PEMINDAHAN
IKN

```
graph LR; A[PEMINDAHAN IKN] --> B[BERHASIL]; A --> C[GAGAL]
```

BERHASIL

GAGAL

No.	Negara	Ibu Kota Lama	Ibu Kota Baru	Tahun	Alasan Pemindahan
1	Rusia	Saint Petersburg	Moskow	1918	Moskow lebih dekan dengan negara-negara Eropa
2	Turki	Istanbul	Ankara	1923	Memindahkan ibu kota negara karena di Istanbul penuh kemerosotan moral (dekadensi) dan korupsi setelah runtuhnya kekaisaran Ottoman
3	Brazil	Rio de Jenairo	Brasilia	1956	Padatnya penduduk dan kemacetan yang tinggi
4	Pakistan	Karachi	Islamabad	1961	Karachi, yang dulu pernah menjadi pusat perdagangan di Sungai Indus, sudah tak layak lagi sebagai ibu kota
5	Nigeria	Lagos	Abuja	1975	Untuk menghindari kepadatan penduduk. Pemindahan ke Abuja dikarenakan akses yang mudah, iklim yang mendukung dan ramah, serta untuk menghindari tensi politik
6	Tanzania	Dar es Salaam	Dodoma	1980	Dodoma dipilih karena lokasinya yang strategis untuk membangun pusat perekonomian yang baru.
7	Sri Lanka	Colombo	Sri Jayawardenepura Kotte	1982	Colombo sudah terlalu penuh dan tak mampu menampung kantor pemerintahan
8	Jerman	Bonn	Berlin	1990	Penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur
9	Kazakhstan	Almaty	Astana	1997	Pasca berakhirnya kekuasaan Uni Soviet
10	Malaysia	Kuala Lumpur	Putrajaya	1999	Kuala Lumpur dianggap terlalu padat
11	Myanmar	Yangon	Naypyidaw	2005	Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis
12	Korea Selatan	Seoul	Sejong City	2005	Pemindahan dilakukan untuk pembangunan pusat perekonomian baru dan pemerataan

Pemindahan/Rencana Pemindahan Ibu Kota Yang Pernah Ada



AMAN: Pembangunan IKN Harus Hormati Hak Masyarakat Adat

Jumat 10 Dec 2021 07:40 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Mas Alamil Huda

Potensi Kerugian Konstitusional Tak Jelas, Uji UU IKN Tidak Dapat Diterima

Gaduh Ibu Kota Negara Bakal Gusur Tanah Adat di Kaltim, Apa Itu Tanah Adat?

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi Sederet Dampak Ekonomi Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara

Kompas.com - 21/01/2022, 08:20 WIB

BERITA POPULER

Selengkapnya

Rabu, 07 September 2022 | 19:12
WIBPasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar
Hukum Perkawinan di Indonesia

DISKUSI AKADEMIK



SEMINAR
“ Ibu Kota Nusantara: Ramah atau Rusak Lingkungan?? ”
Diselenggarakan Oleh
Program Studi Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Seminar "Ibu Kota Nusantara: Ramah atau Rusak Lingkungan??"



TVRI KALIMANTAN TIMUR
DIALOG INTERAKTIF
PUBLIKA
HUKUM DAN KEBIDAJAN
PENYELENGGARAAN NEGARA
MEMBEDAH UU IBU KOTA NEGARA

#ikn #uulkn #iknbaru
PUBLIKA HUKUM #1 "MEMBEDAH UU IKN"

167 views • Feb 4, 2022

👍 5 🗑️ DISLIKE ➡️ SHARE ⬇️ DOWNLOAD 🗂️ CLIP ⚙️ SAVE ...



[CALS]
Constitutional and Administrative Law Society
DISKUSI TERBUKA
IBU KOTA NEGARA UNTUK SIAPA ???
Diselenggarakan Oleh
Program Studi Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
dan
Constitutional and Administrative Law Society

Webinar - Diskusi Terbuka "IBU KOTA NEGARA UNTUK SIAPA ???"



RUANG KRITIS IMPLIKASI IBU KOTA NUSANTARA
DALAM DIMENSI HUKUM



CATATAN KRITIS ATAS RUU IKN
Lamis ilmu
- KEEP MOVING -
TERUS BERGERAK MENGEDUKASI DAN MENGINSPIRASI
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

#ikn #bukotabaru #ruulkn

Catatan Kritis Fakultas Hukum UNMUL atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN)



WEBINAR NASIONAL
DAMPAK PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA
TERHADAP PERSAINGAN USAHA
Kerja Sama
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Dengan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah V
Lamis ilmu
Law Faculty Mulawarman University
<https://facebook.com/fhunmul>
<https://twitter.com/fhunmul>
<https://instagram.com/fhunmul>

Webinar Nasional - Dampak Perpindahan IKN Terhadap Persaingan Usaha

KEADAAN
MASYARAKAT SAAT
INI (HASIL
SEMENTARA
PENELITIAN CIVITAS
AKADEMIKA FH
UNMUL)
Emilda K dkk
(Kekayaan Intelektual
Komunal Masyarakat
Adat Dalam
Hegemoni IKN)

- Terdapat beberapa masyarakat yang sudah lama berdiam di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (transmigrasi tahun 60-an dan perantauan dari Kerajaan Kutai)
- Terdapat beberapa kelompok masyarakat adat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Dayak Paser, Bajao, Dayak Apokayan Modang, Dayak Apokayan Kayan, Dayak Apokayan Kenyah, Dayak Punan Beketan, Dayak Punan Lisum, Dayak Punan Aput, Dayak Basap Jonggon, Dayak Basap Kutai Lama)
- Hidup dengan *tradisional knowledge* dan adat istiadat walaupun sudah mulai bergeser ke arah “pragmatism”
- Bekerja sebagai buruh sawit dan petani karena tidak memiliki lahan sendiri (baik secara personal maupun komunal)
- Minim Skill dan Taraf Pendidikan yang masih rendah
- Usia muda lebih tertarik untuk bekerja di luar Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
- Tidak terlalu banyak terlibat dalam proses penetapan pemindahan ibu kota negara
- Tidak terlalu paham dan pasrah dengan keadaan pemindahan ibu kota negara (memangnya bisa menolak???)
- Berharap akan ada perbaikan taraf kehidupan melalui peningkatan skill dan pendidikan yang dapat menunjang kehidupan mereka di masa mendatang



Problematika Hukum Penguasaan Lahan Masyarakat Lokal Di Ibu Kota Nusantara (Rahmawati Al Hidayah dkk)

Rumusan Masalah

Bagaimana dampak regulasi terkait pertanahan di Ibu Kota Nusantara terhadap konflik penguasaan tanah oleh masyarakat lokal?

Bagaimana mengatasi konflik penguasaan tanah oleh masyarakat lokal di Ibu Kota Nusantara?

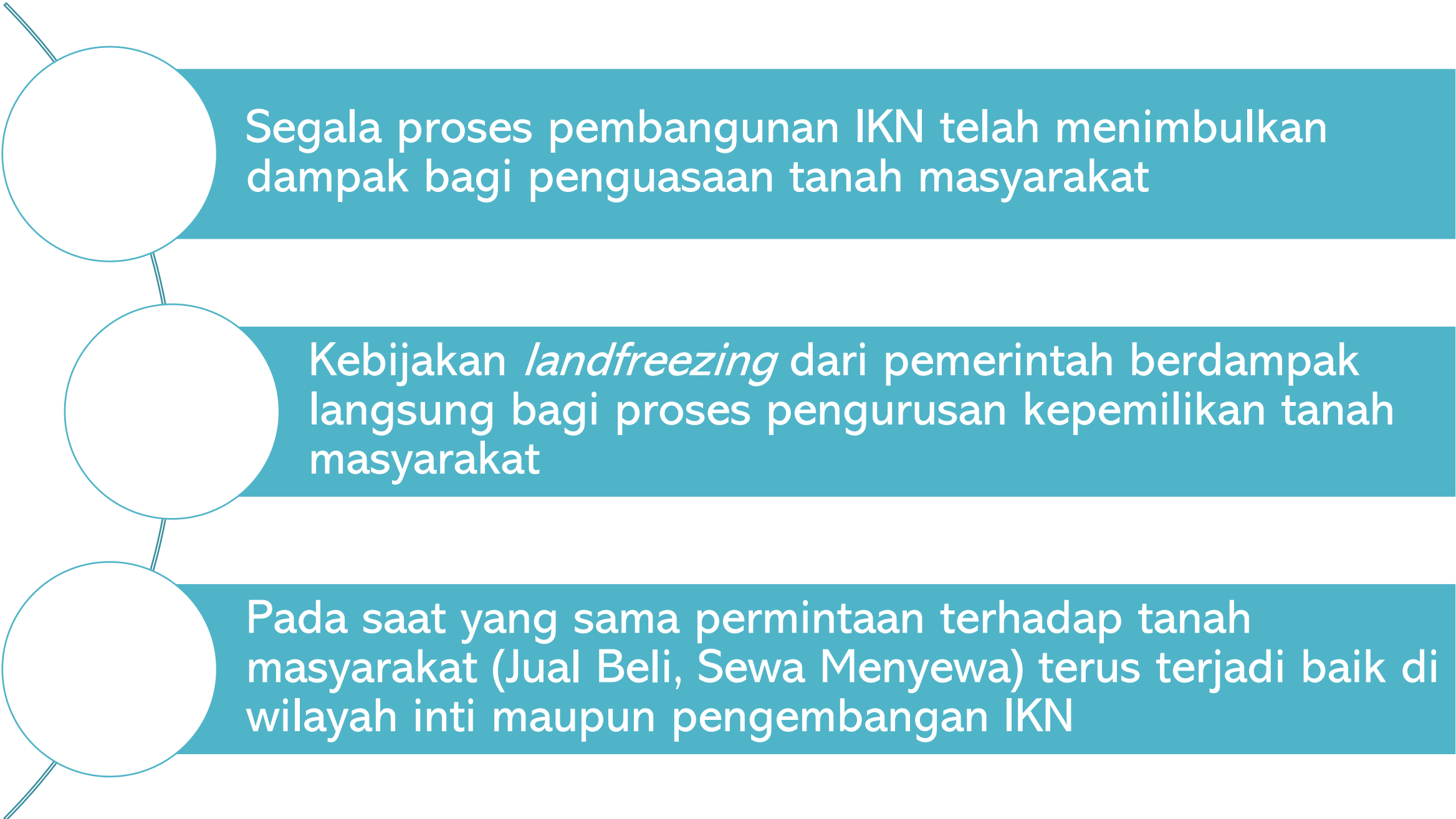
Temuan Sementara

INFORMASI DARI MASYARAKAT LOKAL

- Komunitas merasa terintimidasi; dilarang membangun, berkebun, padahal mereka memiliki wilayah yang mereka lindungi (lahan adat) yang sampai sekarang belum jelas bagaimana kelanjutannya
- Belum ada komitmen dari pihak terkait berkaitan dengan wilayah komunitas
- Alas hak penguasaan tanah bersifat individu

INFORMASI DARI PEMERINTAH/BPN

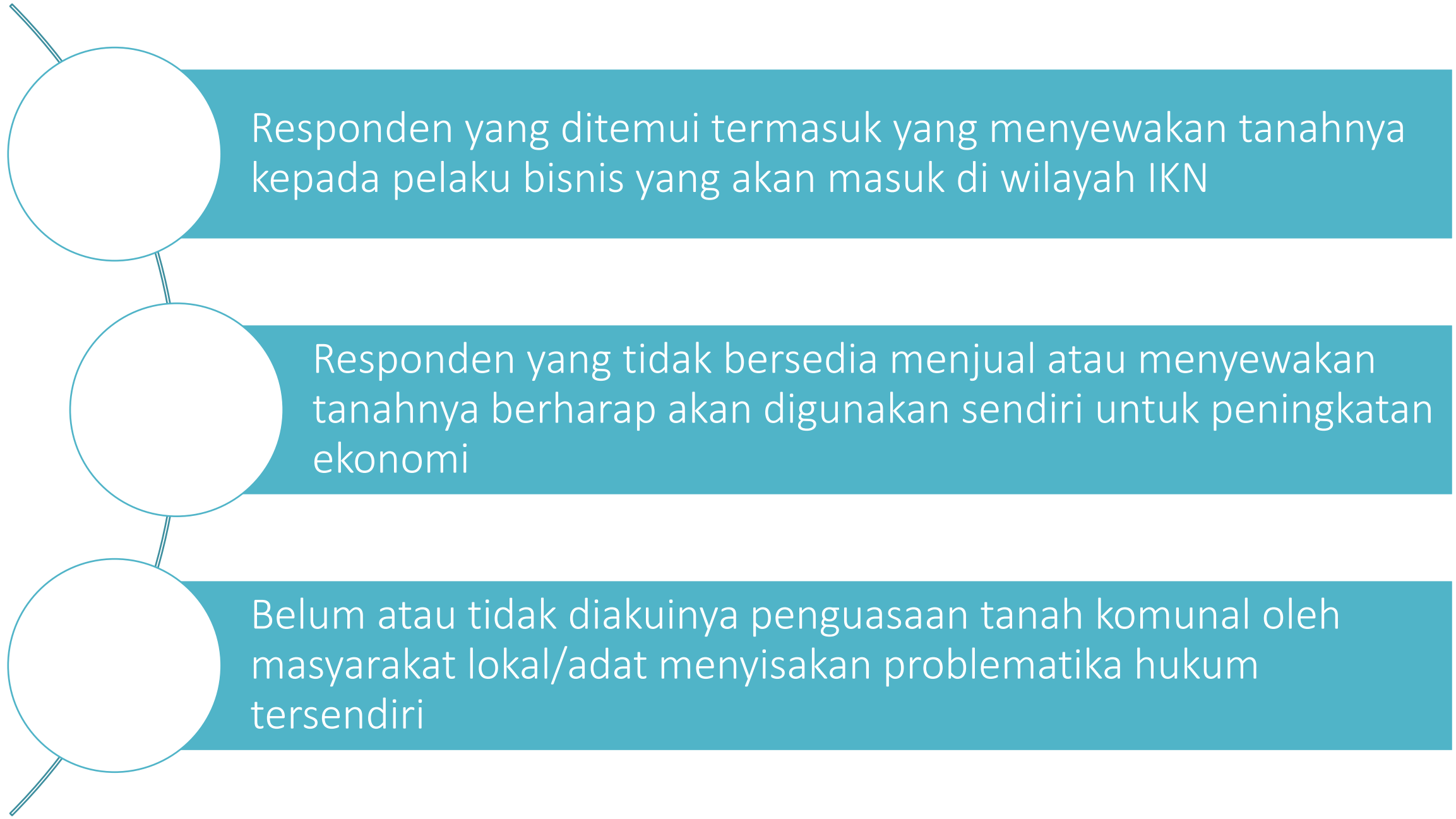
- Seluruh proses pembangunan IKN tertuang dalam masterplan IKN berisi data yang komprehensif termasuk dalam hal penguasaan tanah
- Terkait lahan/tanah yang dikuasai masyarakat masuk dalam wilayah IKN, telah ada mekanisme pelepasan haknya.



Segala proses pembangunan IKN telah menimbulkan dampak bagi penguasaan tanah masyarakat

Kebijakan *landfreezing* dari pemerintah berdampak langsung bagi proses pengurusan kepemilikan tanah masyarakat

Pada saat yang sama permintaan terhadap tanah masyarakat (Jual Beli, Sewa Menyewa) terus terjadi baik di wilayah inti maupun pengembangan IKN



Responden yang ditemui termasuk yang menyewakan tanahnya kepada pelaku bisnis yang akan masuk di wilayah IKN

Responden yang tidak bersedia menjual atau menyewakan tanahnya berharap akan digunakan sendiri untuk peningkatan ekonomi

Belum atau tidak diakuinya penguasaan tanah komunal oleh masyarakat lokal/adat menyisakan problematika hukum tersendiri



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK

TUJUAN >>> PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TANPA MENGABAIKAN HAK-HAK MASYARAKAT

SASARAN >>> MENINGKATNYA PEMAHAMAN STAKE HOLDER AKAN HAK-HAK MASYARAKAT TERDAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA dan MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN HAK-HAK PERSONAL ATAU KOMUNAL SEBAGAI SUBJEK TERDAMPAK

ARAH KEBIJAKAN >>> PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK TERDAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

STRATEGI >>> MELIHAT KEMBALI PERENCANAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DAN KOMUNIKASI INFORMATIF-TRANSPARAN-PARTISIPATIF DENGAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK TERDAMPAK

PROGRAM

PENINGKATAN PEMAHAMAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI MASYARAKAT BAGI APARATUR PELAKSANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

ADVOKASI/PENDAMPINGAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK TERDAMPAK BERBASIS HASIL RISET

PROGRAM TERSEBUT DITINDAKLANJUTI DENGAN BERBAGAI MACAM KEGIATAN SEPERTI:

1. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PELAKSANA
2. PENYAMPAIAN INFORMASI YANG UTUH DAN TRANSPARAN
3. RISET BERSAMA ANTARA PERGURUAN TINGGI-PEMERINTAH-NGO
4. PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT SEBAGAI SUBJEK TERDAMPAK
5. DAN LAIN-LAIN

**Terima
Kasih**

**Matur
Nuwun**

Thank You